

Judul : Pengadaan Bansos Belum Dibayar Nih: Aduan Pedagang Beras
Tanggal : Sabtu, 01 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Aduan Pedagang Beras

Pengadaan Bansos Belum Dibayar Nih

ANGGOTA Komisi VIII DPR Abdul Wachid menyoroti belum lunasnya pembelian beras dari pelaku usaha yang berasal dari program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin. Dia pun mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) segera turun menelusuri persoalan tersebut.

“Ini merupakan persoalan yang sangat menyentuh hati kami kaitannya dengan bansos yang sudah digelontorkan ke daerah. Di daerah itu ada pemda yang nakal, yaitu pedagang beras mendapatkan alokasi dana bansos (namun belum dilakukan pelunasan-red),” kata Wachid di Jakarta, kemarin.

Wachid menuturkan, pedagang beras itu datang menemui dirinya di sela-sela kegiatan reses. Pedagang tersebut adalah ibu tua dan bapak-bapak yang merupakan salah satu *vendor* dalam program bansos tahun 2020-2021 di Jepara.

“Jadi ibu ini nangis lantaran beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor ini ternyata tidak dibayar oleh Pemda (Je-

para) sebesar Rp 419 juta,” ujarnya.

Sementara satu pelaku usaha lagi, sambung politisi Fraksi Gerindra ini, mengaku sampai saat ini belum menerima hasil program pengadaan beras bansos sebesar Rp 1,2 miliar. Wachid berusaha mengonfirmasi masalah ini ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara. “Saya tanyakan ini kenapa nggak diselesaikan?” jelasnya.

Dari kronologis yang diperolehnya, saat itu Pemda memberikan penugasan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) untuk melakukan pengadaan beras bansos. Perusda kemudian memutuskan untuk melakukan pengadaan beras kepada kedua pedagang ini dengan harga beras senilai Rp 8.500 per kilogram.

“Pemda sampaikan katanya sudah memerintahkan Perusda untuk menyelesaikan tapi sampai sekarang belum,” ujarnya.

Abdul Wachid pun turut prihatin dengan masalah yang dialami para vendor beras tersebut. Apalagi, dana yang digu-

nakan dalam pengadaan beras bansos tersebut merupakan uang pinjaman bank dan pihak lain. Sehingga ibu tersebut harus melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 2 juta per bulannya.

“Mereka berdua ini datang ke tempat saya minta pertolongan karena tidak tahu lagi mengadu ke siapa karena tidak paham hukum. Memang ada LSM mau bantu tapi tidak diteruskan malah katanya diminta-minta,” ujarnya prihatin.

Karena itu, dia berharap Kemensos segera turun tangan agar masalah yang mendera pelaku usaha beras ini bisa segera tuntas. “Saya mohon ada petugas turun ke sana karena kasihan ini,” tambah dia.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharani memastikan akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. “Insya Allah untuk yang di Jepara ini akan kami usahakan untuk rakor (rapat koordinasi, red). Kami tidak berjanji tapi kami akan berusaha,” jelas Risma. ■ KAL